

INDONESIA KEMBALI MENJADI UPPER MIDDLE-INCOME COUNTRY



Indonesia berhasil kembali kedalam kategori *upper middle income country* (UMIC) di tahun 2023 dengan GNI per kapita mencapai USD4.580 (batas bawah UMIC sebesar USD4.466). Posisi ini sebenarnya telah di raih Indonesia di tahun 2019 dengan GNI per kapita sebesar USD4.070 saat ambang bawah UMIC adalah USD4.045, sayangnya pandemi Covid-19 yang berdampak masif secara global menyebabkan Indonesia kembali tergelincir ke *lower middle income country* (LMIC) di 2020.

Selain itu, kita juga harus berhati-hati karena rentang UMIC juga selalu berubah setiap tahunnya. Hal ini yang menyebabkan Indonesia gagal kembali menjadi UMIC di tahun 2021, walaupun GNI per kapita telah mencapai USD4.170 lebih tinggi dari GNI per kapita 2019 sebesar USD4.050. Ambang bawah UMIC meningkat dari USD 4.045 di 2019 menjadi USD4.256 di 2021 dan USD4.466 di 2022.

Berdasarkan data dari *World Development Indicator*, terjadi kenaikan sekitar 4 persen untuk rentang UMIC. Untuk itu diperlukan kenaikan GNI per kapita Indonesia harus >4 persen per tahun. Namun, agar dapat berstatus *high income country* di tahun 2045, diperlukan setidaknya kenaikan GNI per kapita sekitar 9,7 persen pertahun dimana GNI per kapita Indonesia di tahun 2022 meningkat 9,8 persen dari tahun 2021.

Berdasarkan data tersebut, Indonesia perlu memperkuat fundamental perekonomian domestik agar dapat bertahan dalam posisi UMIC dan tidak terjebak dalam *middle income country trap*. Untuk itu, strategi yang dilakukan di tahun 2022 dapat kembali dilakukan di tahun 2023 seperti kebijakan perlinsos, pengendalian inflasi untuk memperkuat daya beli dan belanja berkualitas. Sinergi program perlinsos dengan berbagai program pemberdayaan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat prasejahtera dapat diperkuat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dan menurunkan tingkat kerentanan, terutama pada kelompok penghasilan rendah, saat terjadi *shock* atau guncangan pada perekonomian.

Pemerintah harus bersikap hati-hati dalam menghadapi kondisi ketidakpastian di tahun 2023 yang berasal dari sektor keuangan, kenaikan utang, perang Rusia-Ukraina, fragmentasi geoekonomi, tingkat

inflasi yang masih tinggi meskipun menurun, serta tingkat suku bunga tinggi yang berlangsung lebih lama (*higher for longer*). Kebijakan APBN harus tetap didesain waspada, antisipatif, dan responsif sehingga APBN dapat melanjutkan perannya sebagai *shock absorber* sebagaimana terjadi pada tahun 2022.

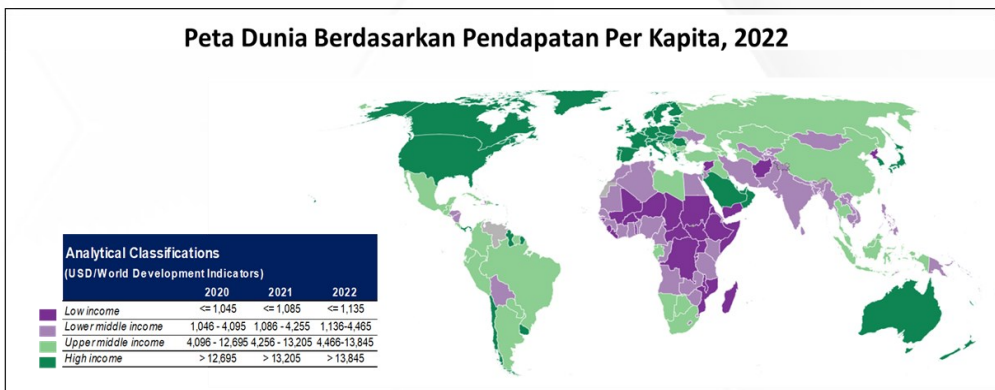
Pemerintah juga perlu memperkuat reformasi fiskal yang telah dilakukan, seperti langkah mobilisasi pendapatan negara melalui efektivitas implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta penguatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga perlu melanjutkan belanja berkualitas melalui: (1) fokus belanja pada peningkatan kualitas SDM (melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas, dan reformasi birokrasi; (2) mengalokasikan belanja secara efisien, efektif, prioritas, transparan, dan akuntabel; serta (3) mengantisipasi ketidakpastian. Pemerintah juga perlu memperkuat sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah terutama untuk penguatan akses, kualitas layanan publik, dan pencapaian target prioritas nasional. Selain itu, kebijakan hilirisasi sumber daya seperti nikel dan kelapa sawit perlu dikawal pelaksanaannya mengingat hal tersebut tidak saja memberikan nilai tambah yang besar kepada perekonomian namun juga menyerap tenaga kerja yang relatif besar. Terlebih, Indonesia merupakan salah satu negara terdepan dalam pemanfaatan bio fuel melalui program mandatory biodiesel (B35) untuk menjaga pembangunan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Melalui bauran kebijakan tersebut, pembangunan nasional yang akan dicapai diharapkan dapat semakin inklusif dan berkelanjutan serta memberikan dampak atas perbaikan indikator kesejahteraan sosial, baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, diharapkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) diupayakan berada pada kisaran 5,3-6,0 persen, penurunan tingkat kemiskinan pada kisaran 7,5-8,5 persen, tingkat ketimpangan (*gini ratio*) pada kisaran 0,375-0,378, serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,31-73,49.

Apabila bauran kebijakan tersebut ternyata dapat meningkatkan GNI per kapita Indonesia di tahun 2023 lebih dari 9 persen, maka hal ini dapat menjadi formula baru untuk kebijakan

pembangunan ke depannya. Perlu *effort* yang lebih keras dan konsisten agar Indonesia tidak terjebak ke dalam *middle income trap*, seperti di banyak negara a.l. Malaysia yang telah tiga dekade belum berhasil menembus ke dalam *high income country*. Namun demikian, Pemerintah optimis dengan pencapaian sampai saat ini dan kemampuan pengelolaan APBN yang adaptif dengan dinamika perekonomian global, maka target Indonesia emas 2045, termasuk menjadi *high income country*, seperti halnya yang mustahil untuk dicapai.

Peta Dunia Berdasarkan Pendapatan Per Kapita, 2022



Sumber: World Bank

Realisasi APBN

Semester I Tahun 2023

Uraian (triliun rupiah)	2022		2023				
	Growth Real Semester I (%)	APBN	Realisasi Semester I	% thd APBN	Growth y-o-y (%)	Growth m-o-m (%)	Growth m-t-m (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	▲ 50,6	2.463,0	1.407,9	57,2	▲ 5,4	▼ (25,3)	▼ (4,9)
I. Penerimaan Perpajakan	▲ 54,3	2.021,2	1.105,6	54,7	▲ 5,4	▼ (22,9)	▼ (5,4)
1. Penerimaan Pajak	▲ 58,2	1.718,0	970,2	56,5	▲ 9,9	▼ (21,0)	▼ (1,6)
2. Kepabeanan & Cukai	▲ 36,5	303,2	135,4	44,7	▼ (18,8)	▼ (35,7)	▼ (28,4)
II. PNBP	▲ 38,4	441,4	302,1	68,5	▲ 5,5	▼ (33,1)	▼ (2,7)
III. Hibah	▲ 242,7	0,4	0,1	36,0	▼ (54,1)	▼ (85,9)	▼ (62,3)
B. BELANJA NEGARA	▲ 6,4	3.061,2	1.255,7	41,0	▲ 0,9	▼ (36,3)	▼ (33,0)
I. Belanja Pemerintah Pusat	▲ 10,2	2.246,5	891,6	39,7	▲ 1,6	▼ (45,4)	▼ (50,0)
1. Belanja K/L	▼ (12,4)	1.000,8	417,2	41,7	▲ 5,9	▲ 21,9	▲ 32,7
2. Belanja non-K/L	▲ 39,4	1.245,6	474,4	38,1	▼ (1,9)	▼ (79,2)	▼ (82,4)
II. Transfer Ke Daerah	▼ (1,7)	814,7	364,1	44,7	▼ (1,0)	▼ (12,1)	▲ 55,1
C. KESEIMBANGAN PRIMER	▲ 340,0	(156,8)	368,2	(234,9)	▲ 32,0	▲ 268,9	▲ 192,6
D. SURPLUS/(DEFISIT)	▼ (132,2)	(598,2)	152,3	(25,5)	▲ 66,9	▲ 108,3	▲ 104,1
% thd PDB		(2,84)	0,71				
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	▼ (62,3)	598,2	135,1	22,6	▼ (14,8)	▼ (77,7)	▲ 115,8
SILPA/(SIKPA)			287,3				

Leading Indicators yang Berpengaruh terhadap Postur APBN

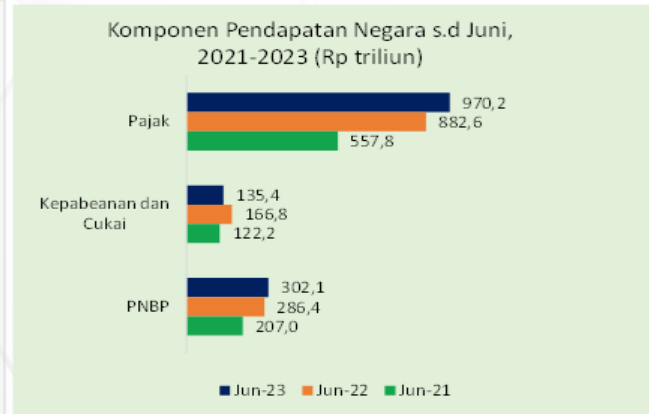
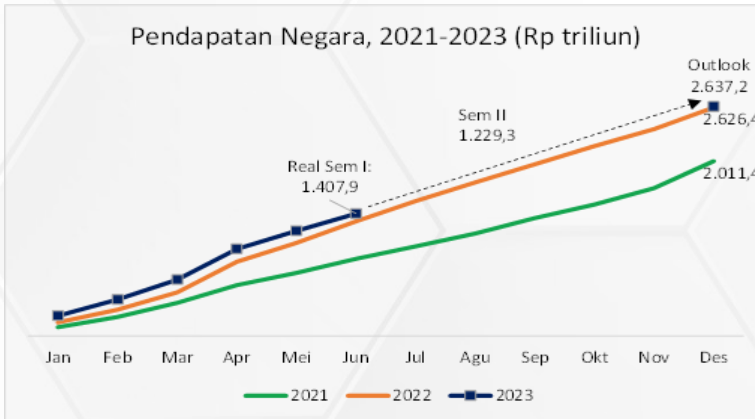
Kinerja perekonomian Indonesia pada Juni 2023 relatif terjaga, dengan inflasi yang tetap berada dalam tren menurun di tengah masa HBKN idul adha. Dari sisi supply, aktivitas produksi domestik tetap terjaga, dengan PMI manufaktur Indonesia yang kembali meningkat di bulan Juni 2023 meskipun dari sisi demand sedikit mengalami penurunan, yang terindikasi pada lebih rendahnya IKK dan perkiraan IPR di bulan Juni 2023. Dari sisi keuangan, pasar keuangan domestik terpantau stabil dengan nilai tukar rupiah yang terjaga dan suku bunga yang menurun seiring dengan kebijakan The Fed yang mengerem kenaikan kenaikan suku bunga acuannya dalam rapat FOMC pada bulan Juni 2023. Sementara itu, tren penurunan harga komoditas dunia kembali berlanjut pada bulan Juni 2023. Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh kekhawatiran pasar atas ekonomi global khususnya di Kawasan Eropa dan AS seiring dengan PMI manufaktur global yang mencatatkan level kontraksi terendah sepanjang tahun 2023, serta meningkatnya stok minyak mentah global, terutama di negara OECD. Di sisi lain, harga komoditas utama lain Indonesia seperti batubara dan CPO juga mengalami penurunan pada Juni 2023. HBA Juni mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah sejak Februari 2022 terutama dipengaruhi oleh penurunan permintaan thermal coal dari eropa, serta rendahnya harga energi lainnya, seperti LNG. Harga referensi CPO juga mengalami penurunan, terutama pada periode 16-30 Juni 2023 menjadi US\$723,45/MT dipengaruhi antara lain oleh melambatnya permintaan atas kelapa sawit dunia, peningkatan pasokan produksi kelapa sawit global dari Indonesia dan Malaysia, serta penurunan harga minyak nabati seperti kedelai.

SEKTOR RIIL	Jun-23	mtm (%)	yoy (%)	Pengaruh
1. Inflasi (% , ytd)	1,24	▲ 0,14	▲ 3,52	• PPh • PPN • PNBP K/L
2. Indeks Penjualan Riil	223,2	▼ 0,1	▲ 8,0	• PPh • PPN • Cukai
3. Indeks Keyakinan Konsumen	127,1	▼ 1,2 poin	▼ 1,0 poin	• PPh • PPN • Cukai
4. PMI Manufaktur Indonesia	52,5	▲ 2,2 poin	▲ 2,3 poin	• PPN • PPh • PNBP SDA
SEKTOR MONETER	Jun-23	mtm (%)	yoy (%)	Pengaruh
1. Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.932	▼ 0,8	▼ 1,7	• Perpajakan • PNBP SDA • Subsidi dan Kompensasi
2. Yield SUN-10 Thn (%)	6,22	▼ 0,16 poin	▼ 1,08 poin	• Belanja Bunga Utang • Pembiayaan Anggaran (Utang)
SEKTOR EKSTERNAL	Jun-23	mtm (%)	yoy (%)	Pengaruh
1. ICP (US\$/br1)	69,36	▼ 1,1	▼ 41,0	• PPh Migas • PNBP SDA • Subsidi dan Kompensasi • Transfer ke Daerah
2. HBA (US\$/T)	191,26	▼ 7,3	▼ 41,0	• PNBP SDA • Transfer ke Daerah
3. Harga CPO (US\$/MT)	723,45	▼ 19,0	▼ 57,4	• Bea Keluar • PNBP BLU
4. Ekspor (US\$ miliar)	20,61	▼ 5,1	▼ 21,2	• Bea keluar • PNBP SDA • Transfer ke Daerah
5. Impor (US\$ miliar)	17,15	▼ 19,4	▼ 18,4	• Bea Masuk • Belanja Barang • Belanja Modal • Subsidi dan Kompensasi

PENDAPATAN NEGARA

"Kinerja Pendapatan Negara Semester I tahun 2023 Tumbuh Positif"

Sampai dengan semester I tahun 2023, pendapatan negara tumbuh sekitar 5,4% (yoy) atau mencapai Rp1.407,9 triliun (57,2% terhadap APBN 2023). Peningkatan tersebut utamanya dikontribusikan dari sumber penerimaan utama yang berasal dari perpajakan dan PNBP. Kinerja penerimaan perpajakan tumbuh 5,4% dipengaruhi terutama oleh aktivitas produksi dan konsumsi, implementasi dampak kebijakan (UU HPP), serta masih tingginya harga komoditas. Sementara itu, PNBP juga mampu meningkat sebesar 5,5% (yoy) dipengaruhi terutama PNBP SDA nonmigas dan setoran dividen BUMN. Di sisi lain, untuk realisasi hibah mencapai Rp0,15 triliun yang dikontribusikan terutama oleh hibah luar negeri terencana.



PERPAJAKAN SEMESTER I TAHUN 2023 MAMPU TUMBUH POSITIF, MESKIPUN MULAI TERMODERASI

Sampai dengan semester I tahun 2023, penerimaan perpajakan telah mencapai Rp1.105,6 triliun atau tumbuh 5,4% (YoY). Capaian tersebut terus menunjukkan gejala normalisasi meskipun masih tumbuh ditopang kinerja positif penerimaan pajak. Selama periode Januari sampai dengan Juni 2023, penerimaan pajak mencapai Rp970,2 triliun atau tumbuh 9,9% (YoY). Capaian penerimaan pajak tersebut masih tumbuh positif meskipun terdapat jenis pajak utama yang mengalami kontraksi yaitu PPh 22 Impor, PPN Impor, serta PPh Final. PPh 22 Impor dan PPN Impor berkontraksi karena penurunan harga minyak dan penurunan impor bahan baku dari industri pengolahan. Sementara itu, PPh Final mengalami kontraksi karena kebijakan PPS yang tidak berulang di tahun 2023. Selanjutnya, jika dilihat secara sektoral, seluruh sektor utama menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat. Sektor pertambangan menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama semester I tahun 2023. Hal ini terutama dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas tahun 2022 yang mengakibatkan peningkatan profitabilitas dan PPh Badan yang dibayarkan saat pelaporan SPT Tahunan. Sementara itu, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan tumbuh meskipun melambat karena tingginya basis tahun 2022 serta perlambatan impor. Secara kontribusi, pajak-pajak terkait aktivitas impor memiliki porsi lebih dari 30 persen dari total penerimaan pajak di sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Realisasi penerimaan kepabebean dan cukai hingga semester I tahun 2023 telah mencapai Rp135,4 triliun atau 44,7 persen terhadap target APBN 2023. Capaian tersebut berkontraksi sebesar 18,8 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan cukai dan bea keluar, meskipun bea masuk masih menunjukkan peningkatan. Penerimaan cukai sebagai komponen terbesar dari penerimaan Kepabebean dan Cukai pada semester I tahun 2023 mampu mencapai Rp105,9 triliun atau 43,1 persen terhadap target APBN 2023. Kinerja cukai tersebut berkontraksi sebesar 12,2 persen yang disebabkan karena penurunan produksi hasil tembakau utamanya

dari SKM dan SPM golongan I. Hal ini juga sejalan dengan fungsi pembatasan konsumsi eksternalitas negatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan kebijakan kenaikan rata-rata tertimbang tarif Cukai HT sebesar 10 persen. Penurunan juga dipengaruhi oleh tingginya basis produksi bulan Maret 2022 akibat kenaikan PPN. Penerimaan CHT yang menjadi mayoritas komponen cukai mengalami kontraksi 12,6 persen, mencapai Rp102,4 triliun atau 44,0 persen terhadap target APBN 2023. Penerimaan yang berasal dari pajak perdagangan internasional dikontribusikan oleh bea masuk dan bea keluar. Dari sisi Penerimaan bea masuk, kinerja positif masih berlanjut mencapai Rp24,2 triliun atau 50,9 persen terhadap target APBN 2023. Kinerja tersebut tumbuh 4,6 persen yang disebabkan oleh menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, peningkatan tarif rata-rata bea masuk dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, serta *extra effort* melalui kegiatan penelitian dokumen impor, penelitian ulang dokumen impor, dan audit kepabebean. Dari sisi komoditas kontributor bea masuk terbesar yang menjadi pengungkit pertumbuhan adalah kendaraan, suku cadang kendaraan, besi dan baja dasar serta barang modal berupa mesin untuk keperluan pertambangan, penggalian, dan konstruksi.

Adapun outlook perpajakan sampai dengan tahun 2023 dipengaruhi oleh tren kinerja positif perekonomian nasional semester I, stabilitas makro ekonomi, dan efektivitas kebijakan fiskal yang terjaga dengan baik. Dengan memperhitungkan realisasi semester I tahun 2023, penerimaan perpajakan akhir tahun diperkirakan mencapai Rp2.118,3 triliun. Outlook tersebut lebih tinggi Rp97,1 triliun dibandingkan target dalam APBN tahun 2023, atau tumbuh 4,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Dengan demikian prognosis penerimaan perpajakan dalam semester II tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp1.012,7 triliun yang dikontribusikan baik dari penerimaan pajak maupun kepabebean dan cukai

Secara rinci penerimaan perpajakan dan forward looking dapat dilihat pada link :

<https://bit.ly/DashboardPerpajakanRealJuni2023>

KINERJA PNBP S.D. JUNI 2023 DIDUKUNG OLEH PENDAPATAN SDA DAN PENDAPATAN KND

Kinerja PNBP sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai Rp302,1 triliun atau 68,5 persen dari APBN 2023, tumbuh 5,5 persen (yoy). Kinerja positif ini terutama didorong oleh tingginya pendapatan SDA terutama SDA Nonmigas dampak dari tingginya harga komoditas di pasar internasional terutama minerba dan pendapatan KND terutama dari dividen BUMN Perbankan.

Realisasi pendapatan SDA migas sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai Rp60,1 triliun atau 45,8 persen dari APBN 2023, mengalami kontraksi 19,9 persen (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya ICP dan lifting migas dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata ICP periode Januari - Juni 2023 mencapai US\$75,2/barel (2022: US\$104,1/barel). Sementara itu, pada periode Januari - Mei 2023 rata-rata lifting minyak bumi mencapai 604,7 ribu barel/hari (2022: 602,9 ribu barel/hari) dan rata-rata lifting gas bumi mencapai sebesar 961,1 ribu barel/hari (2022: 959,0 ribu barel/hari).

Pendapatan SDA Nonmigas menunjukkan kinerja positif dengan realisasi sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai Rp78,3 triliun atau 120,8 persen dari APBN 2023, tumbuh signifikan sebesar 94,7 persen (yoy). Kenaikan ini didukung oleh pendapatan SDA pertambangan minerba yang tumbuh 104,7 persen (yoy) yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas minerba, terutama batubara. Rata-rata HBA Januari - Juni 2023 mencapai US\$254,6/ton (2022: US\$239,8/ton). Realisasi pendapatan SDA kehutanan juga tumbuh 4,1 persen (yoy) disebabkan oleh kenaikan produksi kayu bulat dan upaya optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor Kehutanan. Selanjutnya, realisasi pendapatan SDA panas bumi mengalami pertumbuhan 40,0 persen (yoy) disebabkan oleh adanya tambahan setoran bagian Pemerintah (SBP) yaitu pembayaran atas penjualan listrik PLTP Wayang Windu unit 1 periode Juli-Desember 2022 yang sebelumnya tertunda akibat perbedaan indeks eksalasi harga listrik. Sementara itu, realisasi pendapatan SDA perikanan berkontraksi 93,1 persen (yoy) disebabkan oleh perubahan metode perhitungan PNBP PHP Pra Produksi menjadi Pasca Produksi dimana rata-rata kapal penangkap ikan beroperasi 2-4 bulan di laut, sehingga pada bulan Juni tahun 2023 masih sedikit

kapal yang mendaratkan ikan. Selain itu, perubahan metode pembayaran PNBP PHP yang semula dilakukan sebelum berlayar dan dibayarkan 1 tahun ke depan berubah menjadi berdasarkan riil hasil tangkapan, juga berdampak pada penurunan PNBP PHP.

Realisasi pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai sebesar Rp42,4 triliun atau 86,3 persen dari APBN 2023, tumbuh 19,4 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama berasal dari setoran dividen BUMN Perbankan dan beberapa BUMN Nonperbankan antara lain Semen Indonesia, Jasa Marga dan PII.

Realisasi PNBP Lainnya sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai Rp83,0 triliun atau 73,2 persen dari APBN 2023, berkontraksi 5,5 persen (yoy). Realisasi ini terdiri dari realisasi pendapatan PNBP K/L yang tumbuh sebesar 4,7 persen (yoy) terutama berasal dari kenaikan pendapatan pelayanan dan administrasi hukum, pendapatan jasa transportasi, serta layanan pertahanan. Sementara itu, pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) berkontraksi 16,5 persen (yoy). Sedangkan pendapatan minyak mentah (DMO) sampai dengan 30 Juni 2023 belum mencatatkan penerimaan.

Realisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai Rp38,4 triliun atau 46,3 persen dari APBN 2023, berkontraksi 19,8 persen (yoy). Penurunan ini terutama berasal dari pendapatan pengelolaan dana perkebunan sawit dan pendapatan BPJS Kesehatan. Sementara itu, pendapatan BLU pada beberapa K/L menunjukkan kinerja positif terutama BLU yang berada di bawah kewenangan Kemenkes, Kemenkominfo, Kemenhan, Kemenag, Polri, BP Batam, Kemenhub, dan KemenESDM

Berdasarkan kinerja PNBP sampai dengan bulan Juni tahun 2023, diperkirakan sampai akhir tahun 2023 terdapat potensi tambahan realisasi PNBP dibandingkan target yang telah ditetapkan pada APBN, terutama berasal dari tambahan setoran pendapatan KND dan Pendapatan SDA Nonmigas sektor minerba. Beberapa kebijakan yang akan diambil dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target, antara lain melalui penguatan pengawasan atas pengelolaan PNBP pasca terbitnya PMK Nomor 58/PMK.02/3023 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP, serta penyusunan *analytic tools* pengawasan komoditi perikanan dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan wajib bayar.

BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara s.d. Juni tahun 2023 mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41,0% terhadap pagu APBN tahun 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun, lebih tinggi sebesar 0,9% dibandingkan realisasinya pada periode yang sama di tahun lalu. Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar 71,0% dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 29,0%.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT DIPENGARUHI OLEH DUKUNGAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IKN DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Juni tahun 2023 mencapai Rp891,6 triliun atau 39,7% terhadap pagu APBN tahun 2023, tumbuh 1,6% dibandingkan dengan realisasi di periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp877,2 triliun.

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat utamanya disumbangkan oleh realisasi belanja non K/L sebesar Rp474,4 triliun (38,1% pagu APBN tahun 2023), turun 1,9% dibandingkan dengan realisasinya pada tahun lalu sebesar Rp483,4 triliun. Belanja nonK/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, penyaluran subsidi, serta pembayaran kompensasi. Selanjutnya, realisasi belanja K/L mencapai Rp417,2 triliun (41,7% dari pagu APBN tahun 2023), meningkat 5,9% dibandingkan dengan realisasinya tahun lalu sebesar Rp393,8 triliun. Belanja K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran PKH, Kartu Sembako, PIP,

KIP Kuliah, BOS (Kemenag), bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, bantuan bencana, pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, pembangunan IKN, persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, serta pembayaran gaji dan tunjangan.

Kinerja realisasi belanja K/L s.d. Juni tahun 2023 terutama disumbangkan oleh tingginya realisasi belanja pegawai dan belanja modal yang berturut-turut tumbuh sebesar 11,1% dan 8,3% terhadap realisasinya tahun lalu. Selain itu, untuk realisasi belanja barang dan bantuan sosial s.d. Juni tahun 2023 berturut-turut juga tumbuh sebesar 2,0% dan 3,4% terhadap realisasinya tahun lalu. Adapun penjelasan kinerja belanja K/L menurut jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut.

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp134,2 triliun (49,2% terhadap pagu APBN tahun 2023), meningkat 11,1% dari realisasinya tahun lalu, terdiri atas komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp90,4 triliun dan komponen Tunjangan kinerja, Honorarium, Lembur, dll. sebesar Rp43,8 triliun. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk untuk penyaluran THR dan gaji-13 pada bulan April dan Juni tahun 2023.

Kemudian, realisasi belanja barang sebesar Rp147,4 triliun (39,3% terhadap pagu APBN tahun 2023), tumbuh 2,0% terhadap realisasinya tahun lalu disumbangkan oleh a.l. belanja operasional K/L serta berbagai kegiatan pelayanan publik. Realisasi belanja barang pada beberapa K/L strategis dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kemenhan sebesar Rp21,5 triliun a.l. untuk Harwat/Peningkatan BMN Matra Darat/Laut/Udara/Integratif dan Alutsista, serta Pelayanan Kesehatan; (2) Kemen PUPR sebesar Rp14,9 triliun a.l. untuk Pemeliharaan/Perawatan Sarpras SDA, penyediaan akses rumah layak huni, penanggulangan darurat akibat bencana, dan preservasi jalan nasional; (3) Polri sebesar Rp13,6 triliun a.l. untuk pengadaan/dukungan logistik, dan pelayanan kesehatan; dan (4) Kemenag sebesar Rp12,2 triliun a.l. untuk penyaluran Dana BOS. Selain itu, belanja barang juga dimanfaatkan untuk mendukung persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 melalui pembentukan badan *Ad hoc* Rp6,2 triliun melalui KPU. Selanjutnya, realisasi belanja modal sebesar Rp62,0 triliun (29,7% terhadap pagu APBN tahun 2023), tumbuh 8,3% terhadap realisasinya pada tahun lalu, dimanfaatkan untuk a.l. (1) Sebesar Rp23,5 triliun dimanfaatkan a.l. untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, preservasi jalan dan jembatan, prasarana perkereta apian, serta fasilitas bandara dan perubahan terutama pada Kementerian PUPR dan Kemenhub, (2) pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp29,7 triliun a.l. untuk pengadaan almatsus pada Polri, pengadaan alutsista pada Kemenhan, dan peralatan intelijen taktis pada Kejaksaan dan BIN, serta (3) pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp6,0 triliun a.l. untuk pembangunan gedung perkantoran di kawasan IKN oleh Kemen PUPR, pembangunan terminal bandara pada Kemenhub, pembangunan gedung dikti pada Kemendikbudristek, pembangunan rumah sakit pada Kemenkes, serta pembangunan rusun prajurit TNI dan Polri. Realisasi bantuan sosial sebesar Rp73,6 triliun (51,3% terhadap pagu APBN tahun 2023), meningkat 3,4% terhadap realisasinya pada tahun lalu, dimanfaatkan untuk a.l. (1) penyaluran bantuan sosial pada Kemensos sebesar Rp37,1 triliun a.l. untuk program keluarga harapan (PKH) untuk 9,8 juta KPM, penyaluran program kartu sembako untuk 18,7 juta KPM; (2) pembayaran bantuan pada Kemenkes sebesar Rp23,2 triliun untuk penyaluran bantuan iuran PBI JKN dan Jampersal; (3) penyaluran bantuan PIP sebesar Rp6,1 triliun bagi 10,9 juta siswa dan KIP kuliah sebesar Rp6,0 triliun bagi 710,7 ribu mahasiswa pada Kemendikbudristek dan Kemenag; serta (4) bantuan penanggulangan bencana pada BNPB sebesar Rp1,5 triliun yang dimanfaatkan antara lain untuk bantuan stimulan rumah terdampak bencana Kab. Cianjur kepada 38,4 ribu KK.

Realisasi belanja non-K/L s.d. Juni tahun 2023 terutama disumbangkan oleh pembayaran bunga utang, pembayaran pensiun, serta penyaluran subsidi. Pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp87,5 triliun, meningkat sebesar 5,2% terhadap realisasinya tahun lalu sebesar Rp83,2 triliun disumbangkan oleh meningkatnya jumlah penerima pensiun PNS daerah menjadi kurang lebih 2,1 juta orang. Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp216,0 triliun (48,9% terhadap pagu APBN

tahun 2023) atau meningkat 15,0% terhadap realisasinya tahun lalu. Kemudian, realisasi belanja subsidi mencapai Rp95,8 triliun (32,1% terhadap pagu APBN tahun 2023), atau lebih tinggi 1,5% dibandingkan realisasinya di periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut terdiri atas: (a) subsidi energi sebesar Rp67,1 triliun, mencakup subsidi BBM sebesar Rp8,4 triliun untuk penyaluran BBM bersubsidi sebesar 7,2 juta KL, LPG tabung 3 Kg sebesar Rp32,5 triliun untuk penyaluran 3,3 juta MT, dan subsidi listrik sebesar Rp26,1 triliun bagi 39,2 juta pelanggan; dan (b) subsidi non energi sebesar Rp28,8 triliun, a.l. untuk penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 3,5 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 1,9 juta debitur dengan total penyaluran KUR sebesar Rp105,2 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 84,5 ribu unit rumah. Selain itu, realisasi belanja nonK/L juga dimanfaatkan untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp66,1 triliun serta pelaksanaan program Kartu Prakerja sebesar Rp2,3 triliun bagi 529,1 ribu peserta pelatihan.

Memperhatikan kinerja Belanja Pemerintah Pusat s.d Juni, **Pemerintah perlu menjaga dan mendorong kinerja belanja Pemerintah Pusat, terutama melalui belanja K/L agar dampaknya dapat dirasakan masyarakat.** Pemerintah tetap menjaga komitmen untuk akselerasi pembangunan IKN. Sampai dengan Juni tahun 2023 telah direalisasikan dukungan anggaran sebesar Rp3,42 triliun untuk: (1) pembangunan cluster infrastruktur sebesar Rp2,97 triliun a.l. untuk pembangunan Gedung Kawasan Istana Kepresidenan-Kemenko-Kemensestneg, rumah tapak hunian Menteri, pembangunan sarpras Pemerintahan IKN, SPAM IKN, pembangunan embung KIPP, pengendalian banjir DAS (Daerah Aliran Sungai) Sanggai, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, pembangunan dan preservasi jalan & jembatan, rehab dermaga, pengembangan bandara APT Pranoto Samarinda; serta (2) klaster non infrastruktur sebesar Rp0,45 triliun, a.l. untuk peninjauan lokasi kawasan IKN, survei pembangunan mabes TNI, dukungan pengamanan pembangunan IKN oleh POLRI, dukungan logistik, promosi investasi proyek prioritas, penataan dan pengelolaan BMN, serta operasional Otorita IKN.

PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH S.D. 30 JUNI 2023

Realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai Rp364,1 triliun atau 44,7 persen dari pagu APBN tahun 2023, lebih rendah dibandingkan realisasinya pada tahun 2022 sebesar Rp367,7 triliun (45,7 persen). Hal ini terutama dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran pada seluruh jenis TKD, termasuk perubahan pengaturan penyaluran DAU yang telah memperhatikan kinerja.

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan 30 Juni 2023 telah terealisasi sebesar Rp51,4 triliun atau 37,7 persen dari pagu. Realisasi tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 62,5 persen (yoy) terutama disebabkan oleh kenaikan pagu DBH SDA

pada APBN tahun 2023 menjadi sebesar Rp95,8 triliun dibandingkan pagu tahun 2022 sebesar Rp61,6 triliun. Realisasi penyaluran DBH tersebut meliputi realisasi DBH Pajak sebesar Rp17,7 triliun dan realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp33,7 triliun.

Selanjutnya, **realisasi penyaluran DAU sampai dengan 30 Juni 2023 mencapai Rp197,4 triliun atau 49,8 persen dari pagu, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp216,7 triliun (57,3 persen)** terutama dipengaruhi karena beberapa pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian penganggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya dalam APBD dan menyiapkan laporan rencana penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagai syarat penyaluran. Penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu, dan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya adalah sebagai berikut: (1) DAU penggajian formasi PPPK dilakukan setiap bulan sesuai laporan pengangkatan dan pembayaran gaji PPPK yang diangkat di tahun 2023; (2) DAU pendanaan kelurahan disalurkan dua tahap; serta (3) DAU bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum disalurkan tiga tahap. Penyaluran DAU yang Ditentukan Penggunaannya dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q DJPK menerima laporan syarat penyaluran berupa laporan rencana anggaran dan laporan realisasi masing-masing jenis DAU yang Ditentukan Penggunaannya.

Mulai tahun 2023 DAK terdiri atas: (1) DAK Fisik, (2) DAK Nonfisik, dan (3) Hibah kepada Daerah. Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi penyaluran DAK Fisik mencapai Rp5,1 triliun atau 9,5 persen dari pagu, sedikit lebih rendah dibandingkan penyaluran pada tahun 2022 sebesar Rp5,6 triliun (9,1 persen). Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memulai pelaksanaan lelang atas kegiatan DAK Fisik sedikit lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, **DAK Nonfisik telah tersalurkan sebesar Rp67,2 triliun atau 51,6 persen dari pagu, lebih rendah dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp70,4 triliun (54,7 persen).** Realisasi DAK Nonfisik utamanya dipengaruhi oleh kinerja penyampaian syarat salur dari pemerintah daerah dan rekomendasi penyaluran dana dari masing-masing K/L pengampu DAK Nonfisik, terutama DAK Nonfisik yang memiliki pagu pagu alokasi yang tinggi seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hibah kepada Daerah sampai dengan 30 Juni 2023 telah tersalurkan sebesar Rp599,3 miliar atau 28,8 persen dari pagu APBN tahun 2023. Hibah kepada Daerah tahun 2023 diarahkan untuk mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan,

pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah.

Dana Otonomi Khusus dan DTI Otsus sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 telah tersalurkan sebesar Rp4,6 triliun atau 26,7 persen dari pagu yang terdiri atas: (a) Dana Otsus Aceh sebesar Rp1,2 triliun atau 30,0 persen dari pagu; dan (b) Dana Otsus dan DTI Provinsi-Provinsi di wilayah Papua sebesar Rp3,4 triliun atau 25,8 persen dari pagu yang ditujukan bagi Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat.

Selanjutnya, **Dana Keistimewaan D.I.Y telah terealisasi sebesar Rp1,1 triliun atau 80,0 persen dari pagu, sama dengan realisasinya pada tahun 2022.** Realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh kecepatan dan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran. Dana Keistimewaan D.I.Y digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan keistimewaan yang meliputi: (i) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (ii) kelembagaan; (iii) kebudayaan; (iv) pertanahan; dan (v) tata ruang.

Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp34,7 triliun atau 49,5 persen dari pagu, realisasi tersebut lebih rendah secara persentase namun lebih tinggi secara nominal dibandingkan realisasinya pada periode yang

sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp34,2 triliun atau 50,2 persen. Selanjutnya, penyaluran BLT Desa dengan pagu sebesar Rp17,0 triliun untuk 4,72 juta KPM sampai dengan 30 Juni 2023 telah tersalurkan sebesar Rp4,3 triliun dengan sasaran sebanyak 2,79 juta KPM di seluruh desa. Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, untuk penyaluran Dana Desa terdiri atas: (a) penyaluran Dana Desa nonBLT Desa dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap I sebesar 40% paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus, serta tahap III sebesar 20% paling cepat bulan Juni; dan (b) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa dilakukan secara triwulanan setelah persyaratan penyaluran disampaikan secara lengkap.

Insentif Fiskal merupakan nomenklatur baru dari Dana Insentif Daerah (DID) yang mulai digunakan dalam APBN tahun 2023. Pemerintah mengalokasikan Insentif Fiskal sebagai instrumen penghargaan yang diberikan bagi daerah yang berkinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan. Sampai dengan 30 Juni 2023 realisasi penyaluran Insentif Fiskal mencapai Rp2,0 triliun atau 25,0 persen dari pagu, relatif sama dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2,0 triliun (28,6 persen). Sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal disebutkan bahwa penggunaan Insentif Fiskal tahun 2023 antara lain untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah dan dukungan dunia usaha serta penciptaan lapangan kerja.

PEMBIAYAAN ANGGARAN S.D 30 JUNI 2023

Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp135,1 triliun atau 22,6 persen dari pagu alokasi 2023 sebesar Rp598,2 triliun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp158,6 triliun atau 18,9 persen dari pagu alokasi Perpres 98 tahun 2022 sejalan dengan kebijakan pembiayaan utang yang fleksibel dan *prudent* serta memperhatikan kondisi kas keuangan negara.

Pembiayaan utang secara neto terealisasi sebesar Rp166,5 triliun atau 23,9 persen dari pagu alokasinya sebesar Rp696,3 Triliun. Realisasi pembiayaan utang tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp196,9 triliun atau 20,9 persen dari pagu alokasi Perpres 98 tahun 2022. Penurunan realisasi pembiayaan utang tersebut lebih disebabkan oleh penurunan penerbitan SBN (neto).

Selanjutnya, terkait dengan realisasi pinjaman, **Pinjaman Dalam Negeri (PDN) neto terdapat realisasi sebesar Rp2,5 triliun** yang berasal dari penarikan PDN sebesar Rp3,5 triliun (99,8 persen dari pagunya) dan pembayaran cicilan pokok PDN negatif Rp1,0 triliun (36,5 persen dari pagunya).

Sementara pada **pinjaman luar negeri neto terdapat realisasi sebesar Rp6,1 triliun** yang berasal dari penarikan pinjaman Rp46,2 triliun (74,4 persen dari pagu) dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp40,0 triliun (50,4 persen dari pagu). Penarikan pinjaman luar negeri tersebut turun signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp51,9 triliun, karena Pemerintah tidak lagi melakukan penarikan pinjaman tunai di awal tahun dalam jumlah yang besar seperti tahun 2022 mempertimbangkan kondisi kas negara yang masih *ample*. Sementara itu, pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sedikit lebih tinggi dari realisasinya pada periode yang sama tahun 2022 sebesar negatif Rp39,6 triliun, dikarenakan lebih besarnya jatuh tempo pinjaman dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemberian pinjaman (neto) terealisasi sebesar Rp1,8 triliun atau 33,9 persen dari pagunya yang berasal dari realisasi penerusan pinjaman sebesar Rp0,2 triliun (20,2 persen dari pagu) dan

realisasi penerimaan cicilan pokok penerusan pinjaman sebesar negatif Rp2,0 triliun (31,6 persen dari pagu).

Sementara itu, **realisasi pembiayaan investasi neto sebesar negatif Rp33,4 triliun**, terdiri atas Investasi pada program FLPP sebesar negatif Rp12 Triliun, Investasi lembaga LPDP sebesar negatif Rp15 triliun dan Investasi kepada lembaga LDKPI sebesar negatif Rp2 triliun. Di sisi lain terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp5,6 triliun yang terdiri atas penerimaan kembali investasi dari BPJT dan PT KAI sebesar Rp66,2 miliar dan penerimaan cicilan pokok investasi sebesar Rp5,5 triliun.

Selanjutnya, **alokasi anggaran kewajiban penjaminan belum ada realisasi (pemindahbukuan ke rekening dana cadangan penjaminan pemerintah).** Adapun total saldo rekening tersebut sebesar **Rp11,9 triliun**, yang berasal dari pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan tahun-tahun sebelumnya, untuk memitigasi risiko klaim atas jaminan Pemerintah.

REDAKSI

Direktorat Penyusunan APBN
Gedung Sutikno Slamet Lt. 13
Jl. DR Wahidin No. 1
Jakarta Pusat
Telp: (021) 3849315
Email:
penyusunan.apbn@gmail.com

Terbatas untuk internal DJA

